

BADAN PUSAT STATISTIK

**ST 2023**  
SENSUS PERTANIAN

# Sosialisasi Pembinaan Statistik Sektoral

*disampaikan pada Sosialisasi Rekomendasi Kegiatan Statistik, Metadata Statistik, dan Pembinaan Statistik*

**Tim Pembinaan Statistik,  
BPS Provinsi Riau**

● ● ● ● ●

26 Juli 2023

# 1

## LATAR BELAKANG PEMBINAAN STATISTIK



## DASAR HUKUM PEMBINAAN STATISTIK

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
6. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral
8. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.
9. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral

3

## TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN STATISTIK

PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

### Tujuan Pembinaan Statistik

- a. meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik;
- b. membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional;
- c. mengembangkan Sistem Statistik Nasional;
- d. mendukung pembangunan nasional.



### Sasaran Pembinaan Statistik

1. Penyelenggara kegiatan statistik
2. Responden
3. Pengguna Statistik



4

## Upaya Pembinaan Statistik

a.1. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik;

a.2. Pengembangan statistik sebagai ilmu;

a.3. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan statistik;

a.4. Perwujudan kondisi yang mendukung terbentuknya pembakuan dan pengembangan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran dalam kerangka semangat kerjasama dengan para penyelenggara kegiatan statistik lainnya;

a.5. Pengembangan sistem informasi statistik;

a.6. Peningkatan penyebaran informasi statistik;

a.7. Peningkatan kemampuan penggunaan dan pemanfaatan hasil statistik untuk mendukung pembangunan nasional;

a.8. Peningkatan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik.

5

## Bentuk-bentuk Pembinaan

### Inisiatif BPS

### Inisiatif Non-BPS

a.diklat/bimtek

seminar/webinar

asistensi

*Focus Group Discussion (FGD)*

rapat koordinasi

*workshop*

*coaching clinic*

konsultasi

audiensi

konsolidasi

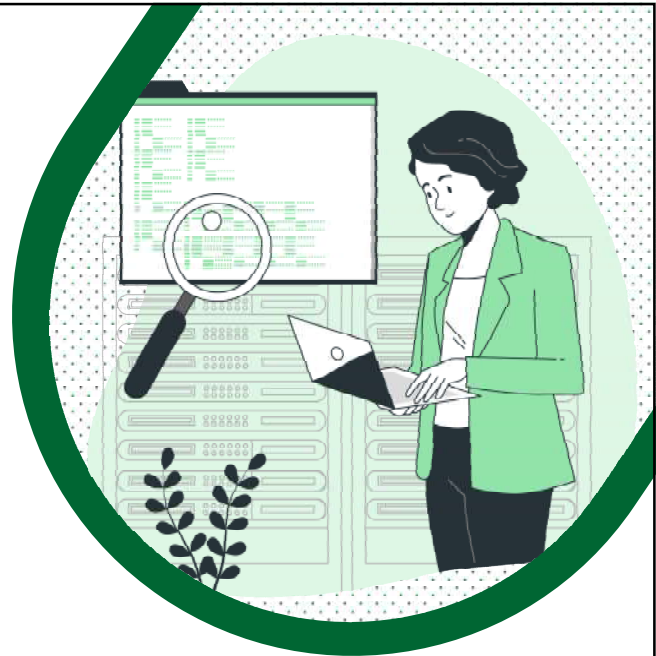
*knowledge sharing*

pameran

6

## 2

## PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL



### PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL



**Pembinaan Statistik Sektoral** adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan BPS untuk memberikan pemahaman penyelenggaraan **statistik sektoral** pada **instansi pemerintah** sesuai dengan cakupan dan bentuk pembinaan.



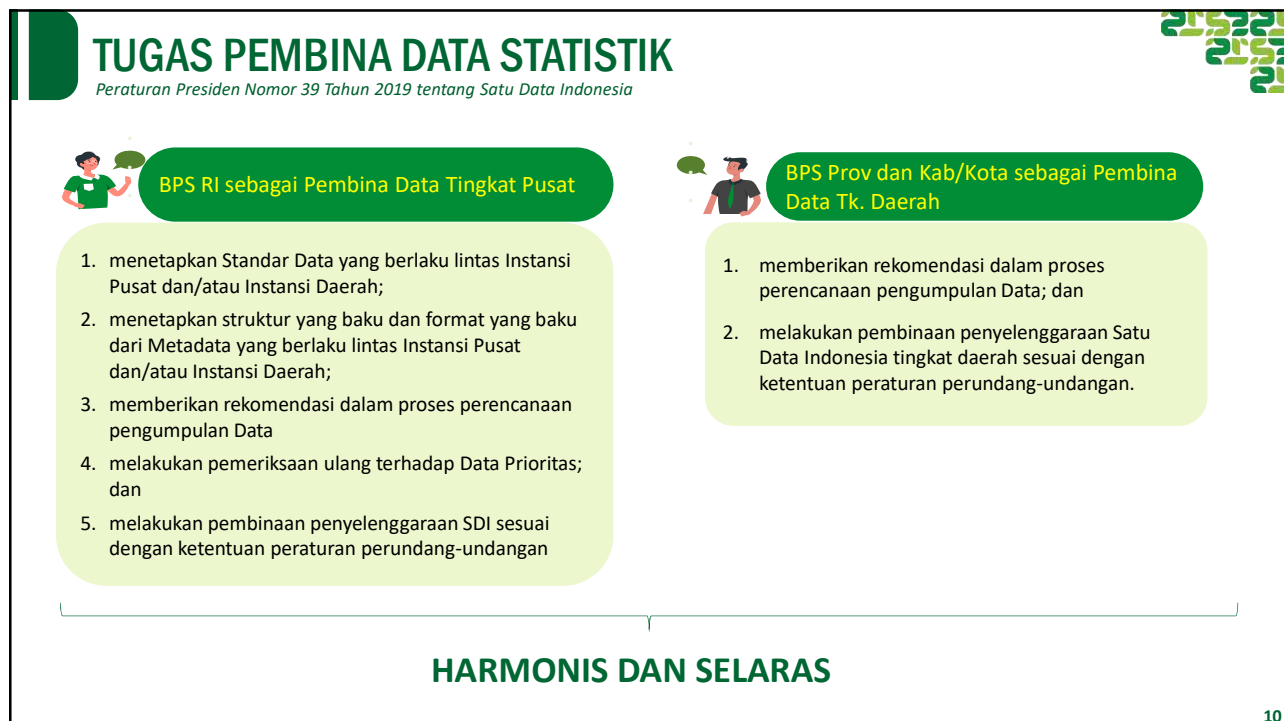
Lebih spesifik, amanat BPS sebagai pembina data statistik sektoral diatur dalam **Perpres Satu Data Indonesia**



**Pembinaan statistik sektoral** selanjutnya dijabarkan dalam Arah Perubahan BPS 2021-2024



Kegiatan pembinaan statistik sektoral ini sangatlah beragam dan didukung oleh semua unit kerja di BPS, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk mewujudkan **Sistem Statistik Nasional** yang andal dan efisien



## Sasaran Pembinaan Statistik Sektoral

K/L/D/I = Kementerian/Lembaga Pemerintah/Dinas/Instansi Pemerintah Lainnya

### Instansi Pemerintah Pusat:

1. Kementerian
2. Lembaga Pemerintahan Non Kementerian
3. Alat Negara
4. Sekretariat Jenderal Lembaga Negara
5. Lembaga Penyiaran Publik
6. Sekretariat/Sekretariat Jenderal Lembaga Non Struktural (JPT Madya)
7. Sekretariat Lembaga Non Struktural (JPT Pratama/JA)
8. Lembaga Pemerintahan Lainnya
9. Lembaga Non Struktural

Sumber: <https://www.menpan.go.id/site/kelembagaan/lembaga-pemerintah-pusat>

### Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas; dan
- e. Badan

### Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.

Sumber: PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

11

## Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

### Pembina Data Statistik Tk. Daerah



BPS Prov/Kab/Kota

Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Peraturan Kepala Daerah

### Walidata Tk. Daerah



Perangkat Daerah Urusan Statistik

- SE Mendagri No.120/065/Bangda
- SE Mendagri No.120/066/Bangda
- Permendagri No.70/2019

### Produsen Data



Perangkat Daerah

### Walidata Pendukung Tk. Daerah



Sekretariat SDI Tingkat Pusat menyediakan Referensi Draft Peraturan Kepala Daerah tentang SDI tingkat Daerah

File dapat diunduh di portal kolaborasi SDI BPS:

<https://s.bps.go.id/forumsdi>

12

## DAFTAR DATA



Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Daftar Data

**Daftar Data** adalah tabel besar yang memuat kebutuhan data, ketersediaan data, serta data yang akan dikumpulkan oleh Instansi Pemerintah dengan atribut standar yang mengikuti metadata yang ditetapkan oleh Pembina Data dan atribut lain yang memudahkan pengelolaan data

✓ **Berisikan:**

- Pengertian Daftar Data
- Tata cara Penyusunan Daftar Data
- Format Daftar Data

✓ Dapat diunduh di Portal Kolaborasi SDI BPS <https://s.bps.go.id/forumsdi>



**Format Daftar Data:**

- Nama data
- Produsen data
- Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data
- Tagging SPBE



**Daftar Data digunakan:**

- sebagai acuan oleh produsen data dalam pengumpulan data
- sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran

Contoh Daftar Data Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis*	Tagging RAD SPBE
Data tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi Di Yogyakarta	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral	Tahunan	Desember	Ketenagakerjaan
Data Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah provinsi Di Yogyakarta	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tahunan	-	Ketenagakerjaan
Data penyandang disabilitas tarlantar yang menerima paket pemukiman di dalam panti sesuai standar gdi	Dinas Sosial	Tahunan	-	Sosial
Data penyandang disabilitas tarlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor induk Kependudukan di dalam panti	Dinas Sosial	Tahunan	Juni	Sosial

## DATA PRIORITAS

**Data Prioritas** adalah Data terpilih yang berasal dari Daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia

Dapat diunduh di Portal Kolaborasi SDI BPS <https://s.bps.go.id/forumsdi>

Format Data Prioritas



Petunjuk Pelaksanaan Kementerian PPN/Bappenas Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang Penyusunan Data Prioritas



Kepmen PPN No 33A Tahun 2023 tentang Penetapan Data Prioritas Tahun 2023

Nama Data	Produsen Data	Jadwal Pemutakhiran	Jadwal Rilis	Tagging RAD SPBE	Tagging RPJMN/RKP	Tagging TPB/SDGs	Tagging Kebutuhan Mendesak
Data pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik PLN	PLN	Harian	Desember	Energi	PN - 5	7.1.1	-
Data pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan dari listrik non-PLN	Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM	Bulanan	Desember	Energi	PN - 5	7.1.1	+



## REFERENSI MATERI PEMBINAAN STATISTIK

### 1. Modul Pembinaan Statistik

Modul Pembinaan Seri Diklat Statistik Sektoral 2019



Modul Pembinaan  
Seri Diklat Statistik Sektoral 2021



Modul Pembinaan  
Seri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) => 2023



**DRAFT**  
Perlu di Uji Publik

Panduan Rekomendasi EPSS



- Berisi rekomendasi umum untuk 38 indikator EPSS
- Untuk internal BPS

15

## REFERENSI MATERI PEMBINAAN STATISTIK (2)

### 2. Referensi Regulasi Lainnya

- Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang **Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia** Tahun 2022-2024
- Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.33A/M.PPN/HK/03/2023 tentang **Penetapan Data Prioritas** Tahun 2023



- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 16 Tahun 2020 tentang **Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 17 Tahun 2020 tentang **Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia**
- Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang **Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat**

- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 4/JUKLAK/SESMEN/11/2022 tentang **Tata Cara Integrasi Portal SDI**
- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 5/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang **Penetapan dan Pembatasan Akses Data**
- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 6/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang **Penggunaan Logo Satu Data Indonesia**
- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 7/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang **Penyusunan Daftar Data**
- Petunjuk Pelaksanaan Nomor 8/JUKLAK/SESMEN/12/2022 tentang **Penyusunan Data Prioritas**

16



## REFERENSI MATERI PEMBINAAN STATISTIK (3)

### 3. File Paparan Pembinaan

Portal Kolaborasi Satu Data Indonesia di Lingkungan BPS:

<https://s.bps.go.id/forumsdi>

#### Pembinaan Statistik Sektoral di tingkat Pusat



17

## Rencana Aksi Satu Data Indonesia

Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.115/M.PPN/HK/07/2022 tentang Penetapan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024

Kegiatan	Output	Rincian Output	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Penanggung Jawab	Instansi Pendukung	Pusat	Daerah
Program: Implementasi Standar Penyelenggaraan dan Penguatan Prinsip Satu Data Indonesia									
1.2. Pengembangan dan Implementasi Standar Data dan Metadata	1.2.1. Standar Data dan Metadata Statistik	1.2.1.1 Sistem Pendukung Pengelolaan Standar Data dan Metadata Statistik	1 Sistem			BPS	Bappenas	✓	
		1.2.1.2 Ketetapan dan Pemutakhiran Standar Data Statistik Nasional	1 Ketetapan (6000 Standar Data kumulatif)	1 Ketetapan (7000 Standar Data kumulatif)	1 Ketetapan	BPS	Bappenas	✓	
		1.2.1.3 Pembinaan Penerapan Standar Data Statistik Instansi Pusat	Pembinaan 15 K/L	Pembinaan 40 K/L	Pembinaan 83* K/L	BPS	Bappenas	✓	
		1.2.1.4 Pembinaan Penerapan Standar Data Statistik Pemerintah Daerah		Pembinaan 15 Provinsi	Pembinaan 34 Provinsi Pembinaan 100 Kab/Kota	BPS	Bappenas		✓
		1.2.1.5 Penetapan Klasifikasi Baku Statistik	3 Klasifikasi Baku (KBJI, KBKI, KBLI-relasi ST 2023)			BPS	Bappenas	✓	
		1.2.1.6. Implementasi metadata statistik sektoral instansi pusat	60% dari K/L sasaran	72% dari K/L sasaran	76% dari K/L sasaran	BPS	Bappenas	✓	
		1.2.1.7. Implementasi metadata statistik sektoral pemerintah daerah	50% dari OPD sasaran	55% dari OPD sasaran	70% dari OPD sasaran	BPS	Bappenas		✓
		1.2.1.8. Pembinaan/asistensi satu data tematik	1 Pembinaan Tematik	1 Pembinaan Tematik	1 Pembinaan Tematik	BPS	Bappenas	✓	✓
Program: Perluasan Kolaborasi dan Penguatan Implementasi Kebijakan Satu Data									
2.2 Perluasan Implementasi Satu Data Indonesia	2.2.4 Penguatan Sistem Statistik Nasional	2.2.4.1 Perpres Sistem Statistik Nasional	1 (Rancangan) Perpres	1 Perpres		BPS	Bappenas	✓	
		2.2.4.2 Sosialisasi Perpres Sistem Statistik Nasional			1 Sosialisasi	BPS	Bappenas Kemendagri	✓	✓

18

## PEMBINAAN STATISTIK DALAM PLATFORM DIGITAL REGSOSEK



Data Regsosek ditetapkan sebagai **Data Induk** dalam Forum SDI Tingkat Pusat pada tanggal 10 Mei 2023

mendukung keberhasilan implementasi dan pemanfaatan Platform Digital Data Regsosek bagi instansi pemerintah dan masyarakat



Pembinaan Statistik Sektoral pada K/L/D



Pembinaan statistik di tingkat Desa (Desa Cantik)



Pembinaan statistik pada Perguruan Tinggi (Pojoek Statistik)



## KAITAN EPSS DENGAN PEMBINAAN STATISTIK SEKTORAL

Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)



**Tahapan EPSS:**

1. Penilaian Mandiri
2. Penilaian Dokumen
3. Penilaian Interviu
4. Penilaian Visitasi (opsional)
5. Harmonisasi

### Hasil EPSS:

1. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
2. Rekomendasi peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral



### Pengertian Rekomendasi EPSS

adalah **Saran dan Masukan** yang diberikan BPS kepada instansi pusat/pemerintah daerah untuk **meningkatkan kualitas** penyelenggaraan statistik sektoral berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Statistik.

### Manfaat Rekomendasi

- **Bagi Instansi Pusat/Pemerintah Daerah**  
Sebagai rujukan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral
- **Bagi BPS**  
Sebagai dasar dalam pembinaan statistik sektoral

## HASIL EPSS UJICoba 2022



Rata-rata Nilai IPS Hasil Ujicoba EPSS 2022

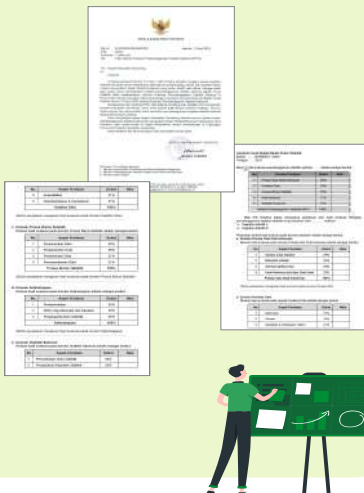
Komponen	Nasional	Pusat	Provinsi	Kabkot
Indeks Domain 1 Prinsip Satu Data Indonesia	1.95	2.10	2.26	1.92
Indeks Domain 2 Kualitas Data	1.95	1.92	2.36	1.92
Indeks Domain 3 Proses Bisnis Statistik	2.03	2.11	2.47	1.99
Indeks Domain 4 Kelembagaan	1.99	2.11	2.33	1.96
Indeks Domain 5 Statistik Nasional	1.84	1.76	2.34	1.81
<b>Indeks Pembangunan Statistik (IPS)</b>	<b>1.97</b>	<b>2.02</b>	<b>2.35</b>	<b>1.94</b>

Jumlah Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah menurut Predikat Nilai IPS Ujicoba 2022

Predikat Nilai IPS	Jumlah				Persentase			
	Nasional	Pusat	Prov	Kabkot	Nasional	Pusat	Prov	Kabkot
Memuaskan (4.2 - 5.0)	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Sangat Baik (3.5 - <4.2)	2	0	0	2	0.42	0.00	0.00	0.48
Baik (2.6 - <3.5)	61	5	11	45	12.92	23.81	34.38	10.74
Cukup (1.8 - <2.6)	220	9	16	195	46.61	42.86	50.00	46.54
Kurang (<1.8)	189	7	5	177	40.04	33.33	15.63	42.24
<b>Total Instansi</b>	<b>472</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>419</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>



## PEMBINAAN STATISTIK BERDASARKAN NILAI IPS



### Poin-poin Pembinaan Statistik berdasarkan EPSS



Perbaikan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral didukung dengan adanya **Dokumen Kebijakan**, seperti SK, SE, SOP, dll



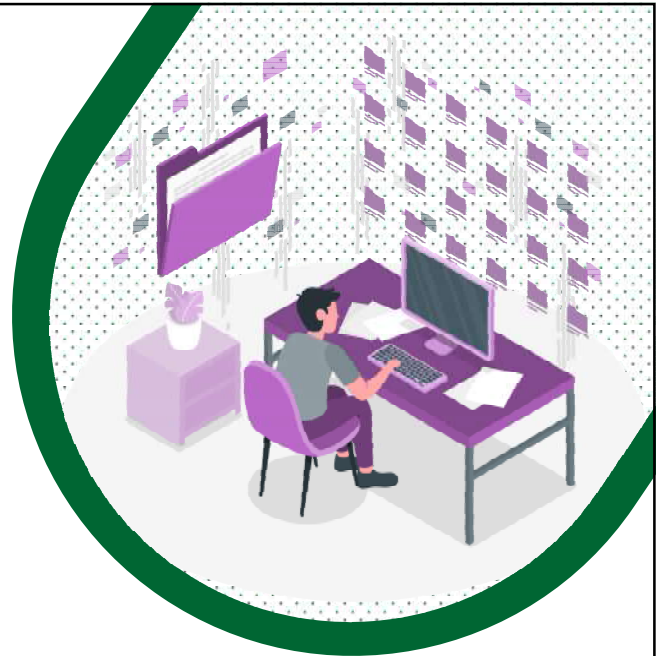
Penguatan pemahaman **Asas Manfaat** EPSS di lingkungan Pemerintahan Daerah



Pembinaan statistik sektoral dilaksanakan berdasarkan **prioritasi** sesuai rekomendasi Hasil EPSS  
Contoh: Jika nilai IPS Aspek Metadata Statistik suatu pemda kecil, maka pembinaan statistik oleh BPS setempat diprioritaskan terlebih dahulu ke penguatan implementasi metadata statistik.

## 3

## MONITORING DAN EVALUASI PEMBINAAN STATISTIK



### Indikator Kinerja Utama Pembinaan Daerah

**Persentase OPD yang  
mendapatkan rekomendasi  
kegiatan statistik**

Rumus:

$$P\ LmRS = \frac{JLmRS}{JLR} \times 100\%$$

Keterangan

P LmRS : Persentase OPD produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.  
JLmRS : Jumlah OPD produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.  
JLR : Jumlah OPD produsen data yang menjadi target pembinaan

1

**Persentase OPD yang  
menyampaikan metadata  
sesuai standar**

Rumus:

$$P\ LmM = \frac{JLmM}{JLs} \times 100\%$$

Keterangan

P LmM : Persentase OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar.  
JLmM : Jumlah OPD yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar.  
JLs : Jumlah OPD yang melakukan kegiatan statistik.

2

**Persentase OPD yang  
mendapatkan pembinaan  
statistik**

Rumus:

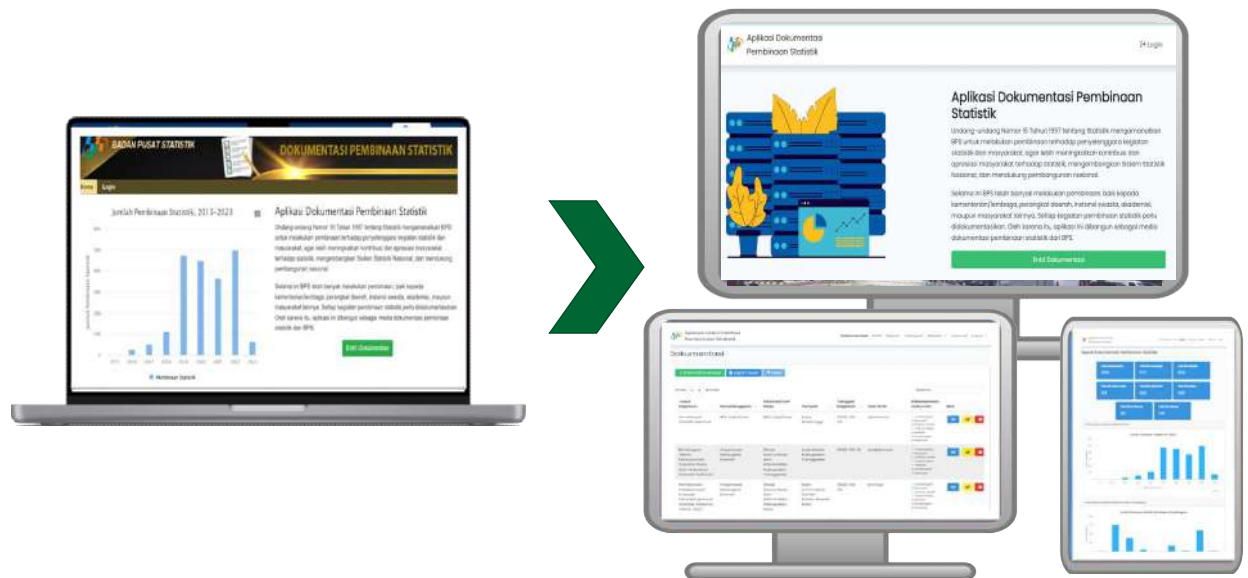
$$P\ LmSS = \frac{JLmSS}{JLs} \times 100\%$$

Keterangan

P LmSS : Persentase OPD yang mendapat pembinaan statistik (%).  
JLmSS : Jumlah OPD yang mendapat pembinaan statistik  
JLs : Jumlah OPD yang menjadi target pembinaan statistik

3

Semua pembinaan statistik yang dilakukan, didokumentasikan melalui:  
[s.bps.go.id/dok\\_pembinaan](https://s.bps.go.id/dok_pembinaan)



25



**BADAN PUSAT STATISTIK**





**Terima Kasih**  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)